

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**CAPACITY BUILDING CAMAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN
KEPALA DESA DI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



TRI HARIANA
167310350

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : TRI HARIANA
Npm : 167310350
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : *Capacity Building* Camat Dalam melakukan
Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : TRI HARIANA
NPM : 167310350
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : *Capacity Building* Camat Dalam melakukan
Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan Menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Ketua

An. Tim Penguji

Sekretaris

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Budi Muliando, S.IP., M.Si

Anggota

Dr. Khairul Kahman, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

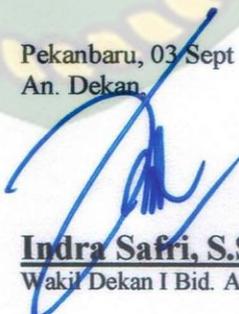
BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **803** /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 02 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 03 Sept 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Tri Hariana
 NPM : 167310350
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : **Capacity Building Camat dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.**
 Nilai Ujian : Angka : "77.53 " ; Huruf : " B1 "
 Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
 Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Budi Muliando, S.IP., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 03 Sept 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 893/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Tri Haryana
N P M : 167310350
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Capacity Building Camat dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

Struktur Tim :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Budi Muliando, S.IP., M.Si. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Rijalul Fikri, S.Sos., MA. | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 02 September 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.
NPK : 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : TRI HARIANA
NPM : 167310350
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : *Capacity Building* Camat Dalam melakukan
Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak.

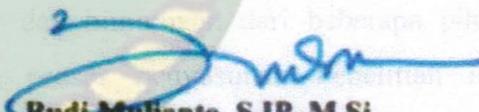
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Ketua,

An. Tim Penguji
Sekretaris,

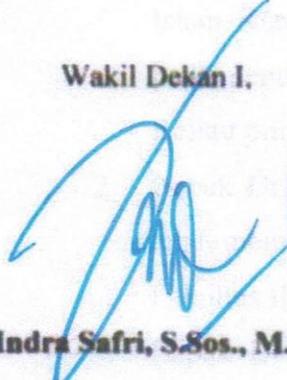

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

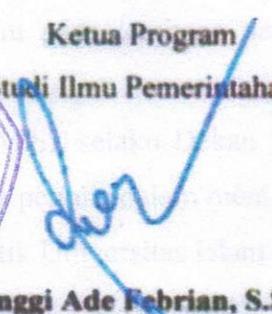

Budi Muliando, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui :

Wakil Dekan I,

Ketua Program
Studi Ilmu Pemerintahan


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.Sos., M.Si



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata-kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain rasa syukur yang sedalm-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat dan hidayahnya-lah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga diridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalan islam.

Dan penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul **“Capacity Building Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”**.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih setulus-tulusnya atas dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, selaku Dekan FISIPOL yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si, Selaku Ketua jurusan program studi Ilmu Pemerintahan Dan seluruh Dosen yang mengajar

program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Zainal.,S.,Sos.,M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Kepala dan pegawai yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahanda “Sutar” , Ibunda ‘Sulastri’ dan Adik-adik yang sangat saya sayangi ‘Amriza Syaputra’ dan ‘Anugrah Agustian’ dan orang spesial dalam hidup saya Irhas Ramadhani yang ikut dengan sabar dan pengertiannya mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, suport serta bantuan materil dan non
8. Teman seperjuangan kelas IP E angkatan 2016 yang saya banggakan, dan sahabat saya “Novi Maulidia” selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga segala bentuk bantuan ilmu, motivasi semua pihak hingga terselesaikan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacanya.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020
Penulis,

Tri Hariana

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENELITIAN.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
SURAT PERNYATAAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	10
A. Studi Kepustakaan.....	10
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	10
2. Konsep <i>Capacity Building</i>	15
3. Konsep Pembinaan.....	20
4. Konsep Camat.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pikir.....	29
D. Konsep Operasional.....	30
E. Operasional Variabel.....	32

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. <i>Informan</i> dan <i>Key Informan</i>	34
D. Teknik Penentuan <i>Informan</i>	36
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Jadwal Waktu Kegiatan	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Singkat Kecamatan Kerinci Kanan	42
B. Letak, Luas Dan Batas Wilayah.....	43
1. Letak dan Luas Wilayah.....	43
2. Batas Wilayah	43
C. Struktur Organisasi Kecamatan Kerinci Kanan	44
D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	45
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A. Identitas Informan	56
1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	56
2. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	57
B. Pembahasan Dan Hasil.....	58
1. Sumber Daya Manusia	58
2. Organisasi.....	62
3. Reformasi Kelembagaan	67
C. Faktor-Faktor Pendorong Dan Penghambat Capacity Building Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Ki Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak	74

BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel III.1 Informan dan Key Informan	34
Tabel III.II Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	39
Tabel IV.1 Nama Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan	43
Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	57
Tabel V.11 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	58

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikiran <i>Capacity Building</i> Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak	29
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kecamatan Kerinci Kanan	44



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI HARIANA
NPM : 167310350
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Oktober 2020

Peleku Pernyataan,


TERAI
MPEL
TEL. 081-773023910
000
RIAU
RIAU
Tri Hariana

**CAPACITY BUILDING CAMAT DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN KEPALA DESA DI KECAMATAN KERINCI KANAN
KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

Oleh :

Tri Hariana

Permasalahan penelitian ini kurangnya *capacity building* camat dalam melakukan pembinaan kepala desa sehingga masih ada beberapa kepala desa yang kurang paham dalam menjalankan tugasnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa kualitas *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia, organisasi dan reformasi kelembagaan. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk menunjang tingkat hasilnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dipahami. Instrument pengumpulan data penelitian ini memprioritaskan wawancara sebagai alat memperoleh bahan baku utama untuk mendapatkan hasil yang sesuai. *Key informan* penelitian ini adalah Camat Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kiri, Kepala Desa Bukit Agung, dan salah satu masyarakat dari masing-masing desa. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa *capacity building* bukan proses yang berangkat dari nol melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, serta sistem agar tetap bertahan ditengah lingkungan yang mengalami perubahan terus menerus dengan memanfaatkan kerjasama antara aparatur kecamatan dengan aparatur desa.

Kata kunci : *Capacity building*, Pembinaan, Camat

**CAPACITY BUILDING CAMAT IN DOING THE DEVELOPMENT OF
THE VILLAGE HEAD IN KERINCI KANAN DISTRICT,**

SIAK REGENCY

ABSTRACT

BY

TRI HARIANA

The problem of this research is the lack of capacity building in the subdistrict head in conducting the training of village heads so that there are still some village heads who lack understanding in carrying out their duties. The purpose of this study was to determine how the quality of the Camat's Capacity Building in Guiding Village Heads in the Kerinci Kanan District of Siak Regency. This study used qualitative research methods. The indicators in this study are human resources, organization and institutional reform. The use of qualitative methods aims to support the level of results so that they can be justified and easily understood. This research data collection instrument prioritizes interviews as a means of obtaining the main raw materials to obtain suitable results. The key informants of this study were the Kerinci Kanan Sub-District Chief, Kerinci Kanan Village Head, Kerinci Kiri Village Head, Bukit Agung Village Head, and one of the communities from each village. Based on the results of the discussion it can be concluded that capacity building is not a process that starts from zero but starts from building existing potentials and then is processed in order to further improve the quality of self, groups, organizations, and systems in order to survive amid an environment that experiences continuous change by utilizing cooperation between sub-district apparatus with village apparatus.

Key Word : Capacity Building, Coaching, Subdistrict Head

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki mimpi dan harapan predikat *Good Governance*, predikat tidak hanya semata-mata didapat begitu saja melainkan perlu usaha ,maksimal untuk mencapainya.

Sesuai dengan Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintah pada umumnya menggerakkan pelayanan umum, pengaturan dan perlindungan masyarakat serta pembangunan dan pengembangan. Sedangkan tugas dan kewajiban pemerintah untuk membuat regulasi tentang pelayanan umum, pengembangan sumber daya produktif, melindungi ketentraman dan persatuan nasional, pengembangan kehidupan demokrasi, pencapaian keadilan dan pemerataan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mendukung pembangunan nasional dan pengembangan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila serta menjaga tegak, lestari dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan otonomi daerah menganut prinsip seluas-luasnya, nyata

bertanggungjawab, guna mewujudkan suatu pemerintahan yang baik maka dibentuklah azas-azas umum pemerintahan daerah yang terdiri dari:

1. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
2. Urusan Pemerintahan Absolute sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 pasal 10 pada poin (g) yaitu Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Pembinaan yang

dilakukan Camat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam mengefektifkan jalannya roda pemerintahan pada tingkat desa.

Dalam konteks pembangunan secara keseluruhan pun upaya pengembangan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain tidak mungkin terjadi suatu proses pembangunan/pengembangan dalam hal apapun tanpa upaya pengembangan kapasitas bagi pelaku maupun juga sistem yang mengaturnya.

Pemerintah kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat sebih tinggi dari Kelurahan/Desa.

Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan Camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu. Dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otonomi daerah, maka dengan persetujuan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 Tentang Kecamatan, maka dijelaskan tugas Camat dalam upaya pembinaan dan perbaikan pemerintahan desa sebagai berikut ;

- a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa. Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan supervise, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan. Selain melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/ atau lurah. Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan. Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa,

Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan.

- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan Di tingkat kecamatan. Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.
- f. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota. Setelah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib Melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada Bupati/Walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Hal yang terpenting dari fungsi *Capacity Building* seorang Camat dalam membinadapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang dilakukan oleh setiap aparat pemerintah dengan masyarakat, sehingga yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Sehingga demikian terciptanya suatu masyarakat yang beradab, dimana menunjang setiap program dan kegiatan demi terciptanya suatu pembangunan yang adil dan merata. Sangat diharapkan

agar Kepala Desa benar-benar harus aktif dalam menyesuaikan agenda-agenda yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Capacity Building yang dilakukan oleh Camat dalam melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa tercakup dalam konsep pembinaan, dimana Camat sebagai pimpinan tertinggi di kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kerja Kecamatan. Upaya yang dilakukan Camat dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Kepala Desa. Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan pelatihan yang ditentukan bertempat di kantor Camat. Saat pertemuan tersebut Kepala Desa dikumpulkan dan diberikan pelatihan oleh Perangkat Kecamatan. Diharapkan pembinaan yang dilakukan ini dapat mengurangi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Kepala Desa, maka akan berakibat baik terhadap kelancaran pelaksanaan pemerintah Desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas masih banyak masalah yang penulis teliti di Kecamatan Kerinci Kanan antara lain sebagai berikut :

1. Camat hanya sebatas menyampaikan tata cara penyusunan Perdas dan Perkades secara tertulis dan pada pertemuan seluruh Kepala Desa jarang ada bimbingan teknis. Disini terlihat masih ada kepala desa yang melakukan kesalahan dalam melakukan tugasnya seperti kurang pemahaman dalam setiap melakukan tugas

karena tidak ada praktik dan bimbingan langsung mengenai tugas khususnya di 3 (tiga) desa yang penulis teliti.

2. implementasi dari masing-masing desa mengenai perencanaan pembangunan secara partisipatif belum berjalan sepenuhnya. Dimana desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan hanya melibatkan LPM, Ketua RW, Kepala Dusun, dan anggota BPD tanpa ada melibatkan masyarakat sepenuhnya yakni pemuda, karang taruna, tokoh agama, tokoh pendidikan.
3. Fasilitas Administrasi pemerintahan desa merupakan salah satu unsur terpenting yang harus dipenuhi setiap desa dalam menyelenggarakan roda pemerintahan desa. Namun terlihat banyak desa di Kecamatan Kerinci Kanan belum mampu memenuhi administrasi pemerintahan desa, dimana ketidakjelasan administrasi desa ini terdapat pada jumlah aparat yang ada di desa hanya 2-5 orang yang mengakibatkan hasil kerja penyelenggaraan pemerintahan desa belum optimal.
4. Bahwa beberapa Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan, diduga bahwa Camat Kerinci Kanan belum melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 pasal 10 pada poin (g) yaitu Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, hal ini terlihat dari 3 Desa yaitu Desa Kerinci Kanan, Desa Kerinci Kiri dan Desa Bukit Agung yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan belum menyelenggarakan pemerintahan secara maksimal.

5. Masih terdapat bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam menjalankan tugas Pemerintahan Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa serta unsur pendukung lainnya seperti infrastruktur Desa.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang dan persoalan yang ditemui, maka dapat penulis rumuskan masalah penelitian, dengan: “Bagaimanakah *Capacity Building* Camat dalam melakukan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dan Apa Saja Faktor-Faktor Penghambat *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui *Capacity Building* Camat dan menjelaskan hasil pelaksanaan tugas Camat dalam melakukan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat *capacity building* Camat dalam melakukan pembinaan Kepala Desa di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- c. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam memahami *capacity building* yang menjadi teori utama untuk membahas penelitian ini.

- d. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi instansi terkait dan masukan bagi Kantor Camat Kerinci Kanan dalam meningkatkan *Capacity Building* dalam melakukan pembinaan di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

- e. Secara Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi mahasiswa Universitas Islam Riau terutama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan yang melakukan kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pengertian pemerintah dan pemerintahan terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas ialah mencakup semua alat kelengkapan negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit yaitu aparatur / alat kelengkapan negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan kekuasaan eksekutif saja.

Pemerintah adalah sekelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah dalam melakukan sesuatu (eksekusi) atau sedang tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. (Syafie, 2013).

“Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan agar menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Secara luas berarti dalam sistem pemerintahan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinyu dan

demokrasi dimana seharusnya masyarakat biasa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut”(Kansil, 2003).

Menurut Ndraha (2011 : 7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintah (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005:321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brazs merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari dengan bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara.

Bevir (dalam Wasistiono dan Simangunsong, 2015:87) mengatakan bahwa “*the term goverment comes from the greek gorld*”, which means steering a ship”. Memposisikan pemerintahan ibarat kemudi kapal (istilah Yunani:Kubernan), mendorong Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*goverment as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*goverment asa process*). Dalam konteks bahasa Indonesia, dibedakan antara memerintah sebagai sebuah institusi atau orang yang memerintah, sedangkan pemerintah diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah.

Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat yang dibutuhkan”, jadi normatif, ideal, *das sollen*), kemudian dari sudut yang kedua yaitu bagaimana senyata (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das sein*). Berdasarkan definisi itu dapat dikonstruksikan ruang lingkup ilmu pemerintahan Ruang lingkup itu sendiri terdiri :

1. Yang diperintah
2. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil)
3. Pemerintah
4. Kewenangan, kewajibab, dan tantangan tanggung jawab pemerintah
5. Hubungan pemerintahan
6. Pemerintahb yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggungjawabnya.
7. Bagaimana membentuk pemerintah yang demikian itu
8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya
9. Bagaiman supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

Secara substantif, menurut Rasyid (2002 : 48) tugas pemerintahan di bagi dalam 3 (tiga) fungsi pokok yaitu :

1. Pelayanan
2. Pemberdayaan

3. Pembangunan

Sedangkan menurut Santos (dalam Lestari, 2004:21) tugas dari pemerintah lebih dijelaskan lagi antar lain :

1. Melaksanakan Pembangunan

Dalam masalah pembangunan sesungguhnya dibagi kedalam dua bagian besar yaitu masalah objek pembangunan dan subjek yang membangun kondisi lingkungannya, selanjutnya adalah masalah dari subjek pembangunan yang pada hakikatnya menyangkut masalah sosial, politik, pendidikan, dan manajemen pemerintahan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam hal ini pihak Pemerintahan Desa sebagai organisasi pemerintah yang menunjukkan tugas-tugas pemerintahan termasuk memelihara ketertiban dan keamanan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

3. Memberikan Pelayanan Publik

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya pemerintahan sebagai pelayan masyarakat, maka dilakukan adanya aparatur yang mempunyai kemampuan proposional serta handal untuk melaksanakan tugasnya.

Menurut Syafie (2010 : 23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pusat dengan daerah, maupun dengan pemerintahan dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Brasz (dalam Syafie 2007:35) berpendapat ilmu pemerintahan dapat di artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu di susun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Di dalam ilmu pemerintahan, yang dimaksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintah secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat lebih tinggi dari pemerintahan Kelurahan/Desa.

Jadi ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi secara baik dan benar antara yang memerintah dengan yang di perintah

2. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk itulah orang yang beruntung. Pemerintahan dalam pengertian yang sempit ialah segala aktivitas, tugas, fungsi, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga yang berwenang serta mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan negara untuk mencapai tujuan negara.

Sedangkan dalam arti yang luas, pemerintahan merupakan sebuah bentuk organisasi yang tugasnya menjalankan suatu sistem pemerintahan dan segala bentuk aktivitas yang terorganisasi & terstruktur dengan baik berlandaskan pada

dasar negara, rakyat dan wilayah negaranya dalam mencapai tujuan sebuah negara. Adapun struktur pemerintah terdiri dari *badan eksekutif, legislatif dan yudikatif*.

Menurut syafiie (2011; 5) Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” dan ketika mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan”, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan sedangkan pemerintahan berarti hal ikhwal pemerintahan itu sendiri (Syafiie, 2011;5).

Sedangkan Subakti (1992; 168) Menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, yaitu pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Menurut Van Poelje (dalam hamdi, 1999; 52) menjelaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

Hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah pada bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan menyisakan pengertian yang menarik. Menurut finer (dalam Kuper, 2000; 419) relasi antara pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam

fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu. Pemerintah demokrasi biasanya menyadari dirinya sebagai “pelayan” bagi masyarakatnya.

Menurut Ndraha (2010; 6) dapat diartikan sebagai gejala sosial, yang bermaknakan terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu maupun kelompok dengan kelompok serta individu dengan kelompok. Menurut Soemendar Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. Dalam beberapa pengertian pemerintahan diatas, dapat dituliskan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk memimpin, membina dan menjaga suatu system ketertiban agar masyarakat bisa menjalani kehidupan secara normal. Pemerintah juga bukan untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, membantu masyarakat dalam mencapai tujuan bersama.

3. Konsep *Capacity Building*

Capacity building yang menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia sebagai serangkaian aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang oleh organisasi untuk memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk mempelajari keahlian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan kerja saat ini dan yang akan datang. (Werner dan De Simone, 2009:4 Daharti 2013:10).

UNDP Daharti (2013:11) selanjutnya mendefinisikan peningkatan kapasitas yaitu proses jangka panjang yang terus menerus melibatkan semua *stake holders*, termasuk kementerian pemerintahan, pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, profesional, anggota masyarakat, akademisi, dan lebih membangun kapasitas menggunakan manusia suatu negara, kemampuan ilmiah, teknologi, organisasi kelembagaan dan sumber daya. Tujuan dari peningkatan kapasitas adalah untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan metode pembangunan, membatasi potensi dan kebutuhan orang-orang dari negara yang bersangkutan.

Menurut (Daniel Ricket dalam Hardjanto, 2006:67) menyebutkan “*the ultimate goal of capacity building is to enable the organization to grow stronger in achieving its purpose and mission*”. Lebih jauh dirumuskan bahwa tujuan dari pengembangan kapasitas adalah :

1. Mengakselestarikan pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pemantauan secara proporsional, tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan peningkatan kapasitas daerah.
3. Mobilisasi sumber-sumber dana Pemerintah, Daerah dan lainnya
4. Penggunaan sumber-sumber dana secara efektif dan efisiensi.

Brown mendefinisikan “*capacity building is a process that increases the ability of persons, organizations or system to meet its stated purposes and objectives*”. (Brown, Lisane et.al, 2001:25). Berdasarkan pendapatnya, pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan

kemampuan seseorang, organisasi atau sistem untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pengertian mengenai karakteristik dari pengembangan kapasitas menurut (Milen, 2004:16) bahwa pengembangan kapasitas tentunya merupakan proses peningkatan terus menerus (berkelanjutan) dari individu, organisasi atau institusi, tidak hanya terjadi satu kali. Ini merupakan proses internal yang hanya bisa difungsikan dan dipercepat dengan bantuan dari luar sebagai contoh penyumbangan (donator).

Untuk lebih jelas lagi Milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk mendefinisikan fungsi sebagai mestinya secara efektif, efisien, dan terus menerus. Sedangkan Morgan dalam Soeprapto merumuskan pengertian kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu. Lebih lanjut melihat *capacity building* sebagai tugas khusus, karena tugas tersebut terhubung dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau suatu sistem tertentu pada waktu tertentu. (Anni Milen, 2004:12).

Hal ini sejalan dengan pengembangan kapasitas menurut Merilee S. Grindle (1997:23) yang menyatakan *capacity building* merupakan upaya yang ditinjau untuk pengembangan suatu strategis guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas kinerja pemerintahan. Efisiensi disini dalam hal

waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai outcome, efisiensi berupa kepatasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan serta responsivitas bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Definisi lain tentang *capacity building* yang dikemukakan oleh Marisson (2001:42) yaitu melihat *capacity building* sebagai suatu proses untuk melaksanakan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

Keseluruhan definisi di atas pada dasarnya mengandung kesamaan dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut :

1. Bahwa pengembangan kapasitas merupakan suatu proses.
2. Bahwa proses tersebut harus dilaksanakan pada tiga level/tingkatan, yaitu individu, organisasi/kelompok, dan kelembagaan.
3. Bahwa proses tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang bersangkutan.

Sesungguhnya pada beberapa literatur pengembangan, konsep *capacity building* sampai saat ini masih menyisahkan perdebatan-perdebatan sebagai *capacitybuilding development* atau *capacity strengthening*, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada (*existing capacity*). Sementara pakar lain yang lebih merujuk pada *coustructing capacity* sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak (*not yet exist*).

Namun Soeprapto tidak condong pada salah satu sisi karena menurutnya keduanya memiliki karakteristik diskusi yang sama yakni analisa kapasitas inisiatif lain untuk meningkatkan kinerja pemerintahan (*goverment performance*). Dalam hal ini searah dengan pendapat Grindle pengembangan *capacity building* merupakan upaya yang dimaksud untuk mengembangkan suatu program strategi meningkatnya efisinsi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah.

Penjelasan Grindle sudah cukup jelas bahwa dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi fokus dan tipe tersebut yaitu:

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti traning, praktek langsung, kondisi iklim dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi serta kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan, aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi.

Berdasarkan teori diatas mengenai *capacity building* disini penulis menggunakan teori Merilee S.Grindle (dalam Edralin, 1997:23) yang menyebutkan bahwa dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe penulis hanya memfokuskan pada poin (1)

yaitu Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti traning, praktek langsung, kondisi iklim dan rekrutmen.

Dengan output *capacity building* merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas kinerja pemerintah. Efisiensi disini dalam waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai outcome, efisiensi berupa kepatantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan serta responsivitas bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.

Sesuai dengan penjelasan Grindle diatas maka penulis menggunakan 3 indikator variabel dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti traning, praktek langsung, kondisi iklim dan rekrutmen.
2. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi serta kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
3. Reformasi kelembagaan, dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan, aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi.

4. Konsep Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil dengan baik.

Selanjutnya Thoha (2008;7) Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya keanjuan dan peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas suatu hal. Ada dua unsur pengertian pembinaan yakni pembinaan itu sendiri berupa tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan yang kedua adalah bahwa dalam pembinaan itu biasanya menunjukkan pada “perbaikan” atas sesuatu.

Menurut Wijaksono (2006;223) mengatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya membawa memelihara suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan semestinya.

Adapun pengertian menurut Sudjana (2004:209) mengemukakan pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur yang disebut terakhir ini berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Dalam suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan atas berbagai kemungkinan peningkatan, unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya

diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal ini persoalan manusia. Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan. Proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (*change*)
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Thoha, 1997:16-17).

Menurut Thoha (2010:49) Pembinaan bisa berupa proses, atau pernyataan tujuan. Pembinaan bisa menunjuk kepada “perbaikan” atas sesuatu. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi :

1. Pemberian Bimbingan
2. Supervisi
3. Konsultasi Pelaksanaan urusan pemerintahan

Arti pentingnya pembinaan menurut Nurcholis (2005:133) adalah sebagai berikut :

1. Diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.

2. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja.
3. Diarahkan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, dan Negara
4. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi.
5. Diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai
6. Diarahkan pada pembinaan sistem karir dan pembinaan prestasi kerja

Pembinaan menurut Winkel (2002;29) di sebutkan bahwa pembinaan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada orang yang belum dewasa agar dia mencapai kedewasaan. Secara sederhana pembinaan merupakan suatu aktivitas sadar dari orang dewasa guna membantu dan membimbing orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa, baik jasmani maupun rohani.

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu terlepas dari siapa yang membina dan apa yang dibina. Wijaksono (2006 : 223) menyatakan pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara sesuatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya. Selanjutnya menurut Fathori (2006 :98) mengatakan bahwa tujuan pelatihan dan pendidikan dalam rangka pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kepribadian dan semangat pengabdian dalam organisasi dan masyarakat;
- b. Meningkatkan mutu dan kemampuan, serta keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinan;

- c. Melatih dan meningkatkan mekanisme kerja dan kepekaan dalam melaksanakan tugas;
- d. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan kerja.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu tindakan atau aktifitas yang harus dilakukan oleh setiap manusia/sumber daya manusia dalam suatu organisasi, karena organisasi adalah suatu wadah yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia menuju kearah yang lebih baik melalui usaha menciptakan suasana kerja yang dapat mendorong untuk dapat mengembangkan kapasitas seseorang.

5. Konsep Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota, Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara pemerintah di wilayah kecamatan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Camat diangkat oleh bupati atau walikota kabupaten.

Menurut Bayu Suryaningrat (2006:2) camat adalah seseorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan Tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan daerah (Nurcholis, 2005 : 133).

Pendelegasian sebagai Kewenangan Bupati/ Walikota kepada Camat dapat menggunakan pola yaitu :

1. Seragam untuk semua kecamatan
2. Seragam untuk kewenangan tertentu yang bersifat umum ditambah dengan kewenangan spesifik (khusus) yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan penduduknya. (Wasistiono, 2003 : 86).

Melalui pendelegasian yang bervariasi sesuai dengan kondisi objektif Kecamatan, dapat disusun langkah-langkah strategi lanjutan sebagai berikut :

1. Menyusun organisasi kecamatan.
2. Menyusun perkiraan kebutuhan personil dari jumlah dan kualitas.
3. Memperkirakan kebutuhan anggaran untuk setiap kecamatan.
4. Memperkirakan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung minimal.
5. Apa diperlukan dapat dilakukan penataan ulang batas wilayah kecamatan dengan menggunakan pendekatan wilayah administrasi pemerintahan seperti yang selama ini digunakan. (Wasistiono, 2003 :86).

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Kecamatan maka diperlukan seorang Camat yang memiliki jiwa kepemimpinan sehingga mampu membawa organisasi kearah pencapaian tujuan. Selain itu juga diperlukan Ilmu Manajemen agar Camat mampu manage atau mengatur bawahannya.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Refida Ayu Meidini	<i>Capacity Building</i> Organisasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo	Menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> (Soeprapto, Riya di 2006 ;7)	Fenomena penelitian terdahulu tentang kurangnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sementara fenomena penelitian ini tentang pembinaan terhadap kepala desa yang kurang hanya sebatas penyampaian saja, implementasi dalam pembangunan masih belum berjalan sepenuhnya dan administrasi pemerintahan desa yang masih banyak belum terpenuhi
2.	Mirawati	<i>Capacity Building</i> Organisasi (Studi Pada Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)	Menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> (Merilee S. Grindle 1997 : 23)	Penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Metro, Sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak
3.	Devit Kurniawan Jusdin Puluhulawa Sastro M. Wantu	<i>Capacity Building</i> Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kinerja Guru (Studi Kasus Guru PPKn SMP Di Kecamatan Wonosari Kabupaten	Menggunakan Teori <i>Capacity Building</i> (Merilee S. Grindle 1997 : 23)	Penelitian sebelumnya membahas <i>capacity building</i> Dinas Pendidikan dalam peningkatan kinerja guru, sedangkan penelitian ini membahas tentang <i>capacity building</i> Camat dalam melakukan pembinaan Kepala

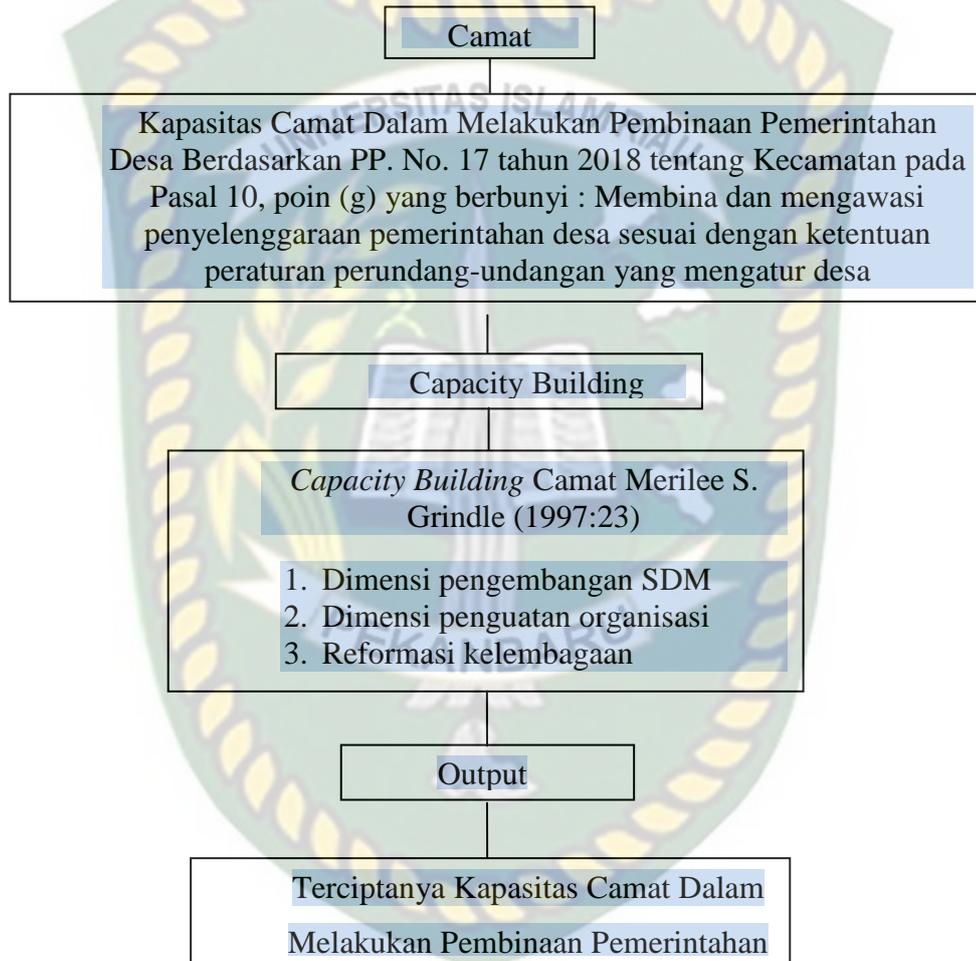
		Boalemo)		Desa
4.	Jeniva Dwi Ratnasari Mochamad Makmur Heru Ribawanto	Pengembangan Kapasitas (<i>Capacity Building</i>) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang	Menggunakan teori <i>capacity building</i> (Milen, 2004)	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Jombang, sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Siak
5.	Harius Eko Saputra Evi Lorita	Analisis Gap Dalam Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> Aparatur Pemerintahan Kecamatan Se-Kota Bengkulu Dalam Pelayanan Publik	Isu penelitian sama-sama membahas tentang <i>capacity building</i>	Isu penelitian terdahulu tentang <i>capacity building</i> dalam pelayanan publik, sementara penelitian ini isunya tentang <i>capacity building</i> camat dalam melakukan pembinaan kepala desa
6.	H. Irwandi Ratnadewi	Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi	Fenomena penelitian membahas tentang administrasi desa	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif – analitis dengan metode yuridis-Normatif dan yuridis-empiris, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif
7.	Ridha Rahim Allibani	Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Efektivitas	Isu penelitian membahas masalah pembinaan	Isu penelitian terdahulu membahas tentang pembinaan pegawai oleh camat dalam upaya meningkatkan efektivitas kerja pegawai, sementara

		Kerja Pegawai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung		isu penelitian ini membahas tentang <i>capacity building</i> camat dalam melakukan pembinaan Kepala Desa
8.	Gayu Naue Sarah Sambiran Frans Singkoh	Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kelurahan Tengkulu Kecamatan Wanea Kota Manado	fenomena fasilitas administrasi	Penelitian terdahulu menggunakan teori Peranan (Arimbi dan Santosa 2008;45), sementara penelitian ini menggunakan teori Pembinaan (santos 2005;52)
9.	Kasni	Kapasitas Kelembagaan Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Sangkatta Selatan Kabupaten Kutai Timur	Fenomena tentang <i>capacity</i>	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kabupaten siak
10.	Harius Eko Saputra, Evi Lorita	Analisis Gap Dalam Pelaksanaan <i>Capacity Building</i> Aparatur Pemerintahan Kecamatan se-Kota Bengkulu Dalam Pelayanan publik	Fenomena <i>capacity building</i>	Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan se-Kota Bengkulu dalam Pelayanan Publik, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kerinci Kanan Dalam Melakukan Pembinaan

Modifikasi peneliti 2020

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut :



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan konsep-konsep yang di pakai antaranya :

1. *Capacity Building* merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas kinerja pemerintah dan *Capacity Building* dalam penelitian ini adalah kapasitas seorang camat dalam melakukan pembinaan kepala desa yang dilakukan di 3 (tiga desa) yang masih belum terarah dan masih perlunya pembinaan dari seorang pemimpin yaitu Camat.
2. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti traning, praktek langsung, kondisi iklim dan rekrutmen.
3. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi serta kegiatan seperti sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial.
4. Reformasi kelembagaan, dengan fokus kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan, aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi dan reformasi konstitusi.
5. Efisiensi disini dalam waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai outcome, bagaimana seorang Camat membuat program tidak hanya sekedar membuat namun memberikan petunjuk serta diskusi jika terjadi masalah dalam pelaksanaan tugas
6. Efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan.

7. Responsivitas bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk tugas tersebut
8. Pembinaan adalah suatu tindakan atau aktifitas yang harus dilakukan oleh setiap manusia/sumber daya manusia dalam suatu organisasi, karena organisasi adalah suatu wadah yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia menuju kearah yang lebih baik melalui usaha menciptakan suasana kerja yang dapat mendorong untuk dapat mengembangkan kapasitas seseorang. Yang dimaksud pembinaan dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.
9. Kecamatan adalah pelaksana kewenangan pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina kepala Desa/Kelurahan.
10. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Tentang *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Merilee S.Grindle (1997:23) yang menyebutkan <i>capacity building</i> merupakan upaya yang ditunjukkan untuk mengembangkan suatu strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, responsivitas kinerja pemerintah. Efisiensi disini dalam waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai outcome, efisiensi berupa kepatasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan serta responsivitas bagaimana menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.	<i>Capacity Building</i> Camat	1.Sumber Daya Manusia (SDM) / Individu	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat program bimbingan untuk kepala desa b. Memberikan petunjuk kepada kepala desa mengenai rincian tugas c. Mengadakan diskusi bila terjadi keraguan dalam menjalankan tugas
		2.Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian intruksi lisan, tertulis dan praktik terhadap kepala desa b. Pemeberian perintah terhadap kepala desa
		3.Reformasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan untuk berinteraksi dengan kepala desa serta masyarakat b. Kemampuan untuk bekerjasama dengan unit-unit perangkat desa

Modifikasi peneliti 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diambil dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan metode penelitian kualitatif.

Menurut Isaac dan Michael (Rakhmat, 2005: 22) metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Selain itu, menurut Burhan Bungin (Bungin, 2007: 68) metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.

Berdasarkan pemahaman metode penelitian deskriptif dari para ahli maka penelitian mengenai *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak tepat menggunakan metode penelitian deskriptif. Selain menggunakan metode deskriptif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini, penulis dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses pencarian dari setiap data yang ada di lapangan. Dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat mendalam, alamiah dan rasional.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Kerinci Kanan dengan alasan memilih lokasi ini dikarenakan adanya permasalahan *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan dan penelitian ini di fokuskan pada 3 Desa/Kampung Kerinci Kanan, Kerinci Kiri dan Bukit Agung.

Selain tu kecamatan kerinci kanan merupakan suatu kecamatan yang memiliki jumlah desa cukup banyak, yaitu sebanyak 12 desa sehingga peneliti tertarik untuk menelitinya dan dikarenakan Kecamatan Kerinci Kanan merupakan Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui *Capacity Building* Camat Kerinci Kanan yang kinerjanya jauh dari pusat kota/kabupaten.

C. Informan Dan Key Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk

penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Menurut Spradley (Moleong, 2004: 165) informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Informan yang intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
3. Informan mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
4. Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi.

Berdasarkan kriteria informan yang dikatakan oleh Spradley diatas, peneliti menentukan informan yang memenuhi kriteria tersebut. Informan yang peneliti tentukan merupakan orang-orang yang terikat secara penuh di dalam penelitian ini. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan teknik key person. Teknik memperoleh informan penelitian seperti itu digunakan karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan key person untuk

memulaimelakukan wawancara atau observasi. Key person ini adalah tokoh formal maupun tokoh informal. (Bungin, 2007: 77).

Penulis menentukan informan penelitian dalam penelitian ini berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terbagi menjadi 4 (empat) orang sebagai informan formal dan 3 (tiga) orang sebagai informan informal.

Tokoh formal yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu Camat, Kepala Desa Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kiri dan Kepala Desa Bukit Agung. Sedangkan tokoh informal yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu 3 (tiga) orang perwakilan dari desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Informan dan Key Informan

No.	Informan	Nama	Jabatan
1.	Camat	M. Hassanal Lutfi,S.STP	Camat
2.	Kepala Desa Kerinci Kanan	Yusrihanis	Kepala Desa
3.	Kepala Desa Kerinci Kiri	Rusli	Kepala Desa
4.	Kepala Desa Bukit Agung	Parlaungan Panjaitan	Kepala Desa
5.	Masyarakat	1. Agus 2. Sutar 3. Rahmad	Masyarakat
	Jumlah	7 orang	

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

D. Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2005:223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi narasumber , partisipasi, atau informan.

Sampel dalam Penelitian Kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Moleong, 2005:298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan atau penentuan informan sebagai sumber informasi atau narasumber dengan pertimbangan bahwa orang atau informan tersebut dianggap mengetahui terkait permasalahan yang nantinya menjadi pertanyaan peneliti. Perkembangan ini misalnya orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan.

Dalam penelitian ini, sebagaimana diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat meenjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap (Riduan dalam buku Rahman, 2009:80).

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung pada saat kita melakukan penelitian, sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adlah Camat dan Kepala Desa berupa identifikasi responden, kapasitas camat dalam melakukan pembinaan terdiri dari pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan, instruksi-instruksi dan memberikan buku petunjuk/pedoman.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi :

1. Keadaan geografis lokasi penelitian
2. Struktur organisasi Kecamatan
3. Peraturan Perundang-undangan
4. Petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis disini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data antara lain:

1. Observasi

Menurut Husaini Usman (2009;52) mengatakan observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan informasi awal dan data sekunder dari Kecamatan Kerinci Kanan

2. Wawancara

Menurut Ridwan (2009;29), Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai Kapasitas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, maupun tulisan angka dan gambar yang dapat mendukung penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Agustus 2019 – Juli 2020:

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019-2020															
		Juli-Agustus 2019				Februari-Maret 2019				Juni-Juli 2020				Agustus-Septemb 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x											
2	Seminar UP						x										
3	Revisi UP							X	x								
4	Penelitian Lapangan										x	X	X				
5	Pengelolaan Data														x	x	
6	Bimbingan Skripsi														x	x	x
7	Ujian Skripsi														x		
8	Revisi dan Pengesahan skripsi															x	x
9	Penyerahan Skripsi															x	

Sumber Data : Modifikasi Penulis Tahun 2020

I. Rencana Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penulisan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 Bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu ;

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan usulan penelitian lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya akan diuraikan Kerangka Pikiran, Konsep Operasional, Hipotesis, Konsep Variabel Penelitian dan Teknik Pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari Tipe Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Penarikan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian serta Sistematisasi Penulisan Skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, fungsi dan tugas, organisasi, sumber daya organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Kapasitas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan bab penutup, penulis membaginya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran berkaitan dengan Kapasitas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak.



BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Kerinci Kanan

Sampai Tahun 1999, Kerinci Kanan masih merupakan bagian dari Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, setelah di sah kannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Maka Kabupaten Siak terbentuk dan Kerinci Kanan merupakan salah satu bagiannya, yakni di bawah Kecamatan Siak, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor : 13 Tahun 2001 tanggal 14 Agustus 2001, dimana saat itu Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari 18 Desa.

Selanjutnya Kecamatan Kerinci Kanan dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 41 Tahun 2002 Tanggal 8 November 2002 yakni Kecamatan Kerinci Kanan dan Kecamatan Lubuk Dalam. Setelah pemekaran Kecamatan Kerinci Kanan meliputi 12 Kampung sedangkan 6 Kampung lainnya berada di Kecamatan Lubuk Dalam.

Pada perkembangan selanjutnya melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Siak Dengan Kabupaten Pelalawan, maka Desa Makmur masuk dibawah Pemerintah Kabupaten Pelalawan, sementara Kampung Delima Jaya yang

sebelumnya ada diwilayah Kabupaten Pelalawan menjadi kampung dibawah Pemerintah Kabupaten Siak.

Sehingga Kecamatan Kerinci Kanan saat ini terdiri dari 12 Kampung/desa, yakni :

Tabel IV.1 Nama kampung/Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan

No.	Nama Kampung/Desa
1	Kampung/Desa Kerinci Kanan
2	Kampung/Desa Kerinci Kiri
3	Kampung/Desa Delima Jaya
4	Kampung/Desa Buana Bhakti
5	Kampung/Desa Bukit Harapan
6	Kampung/Desa Kumbara Utama
7	Kampung/Desa Bukit Agung
8	Kampung/Desa Simpang Perak Jaya
9	Kampung/Desa Gabung Makmur
10	Kampung/Desa Jati Mulya
11	Kampung/Desa Buatan Baru
12	Kampung/Desa Seminai

Sumber : Kantor Kecamatan Kerinci Kanan

Pusat Pemerintahan Kecamatan Kerinci Kanan terletak pada wilayah Kampung Kerinci Kanan, yakni jalan Pertamina- Siak Sri Indrapura KM 72, dengan jarak tempuh dari Kerinci kanan ke Siak Sri indrapura \pm 64 KM.

B. Letak, Luas Dan Batas Wilayah

1. Letak dan Luas Wilayah

Kecamatan Kerincin Kanan terletak pada Titik Koordinat posisi $101^{\circ} 36' 0''$ s/d $101^{\circ} 64' 0''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 24' 30''$ s/d $0^{\circ} 34' 15''$ Lintang Utara, yang merupakan bagian selatan Kabupaten Siak. Kecamatan Kerinci Kanan sebagian besarnya terdiri dari wilayah yang bergelombang dengan luas wilayah 30.629,65 Ha.

2. Batas Wilayah

- a. Utara berbatasan dengan kec. Tualang, Lubuk Dalam dan Dayun
- b. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- c. Barat berbatasan dengan Kota Pekanbaru
- d. Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan

Dengan batas-batas kecamatan yang ada, maka terlihat bahwa Kecamatan Kerinci Kanan merupakan kecamatan yang terletak dibagian paling selatan wilayah Kabupaten Siak.

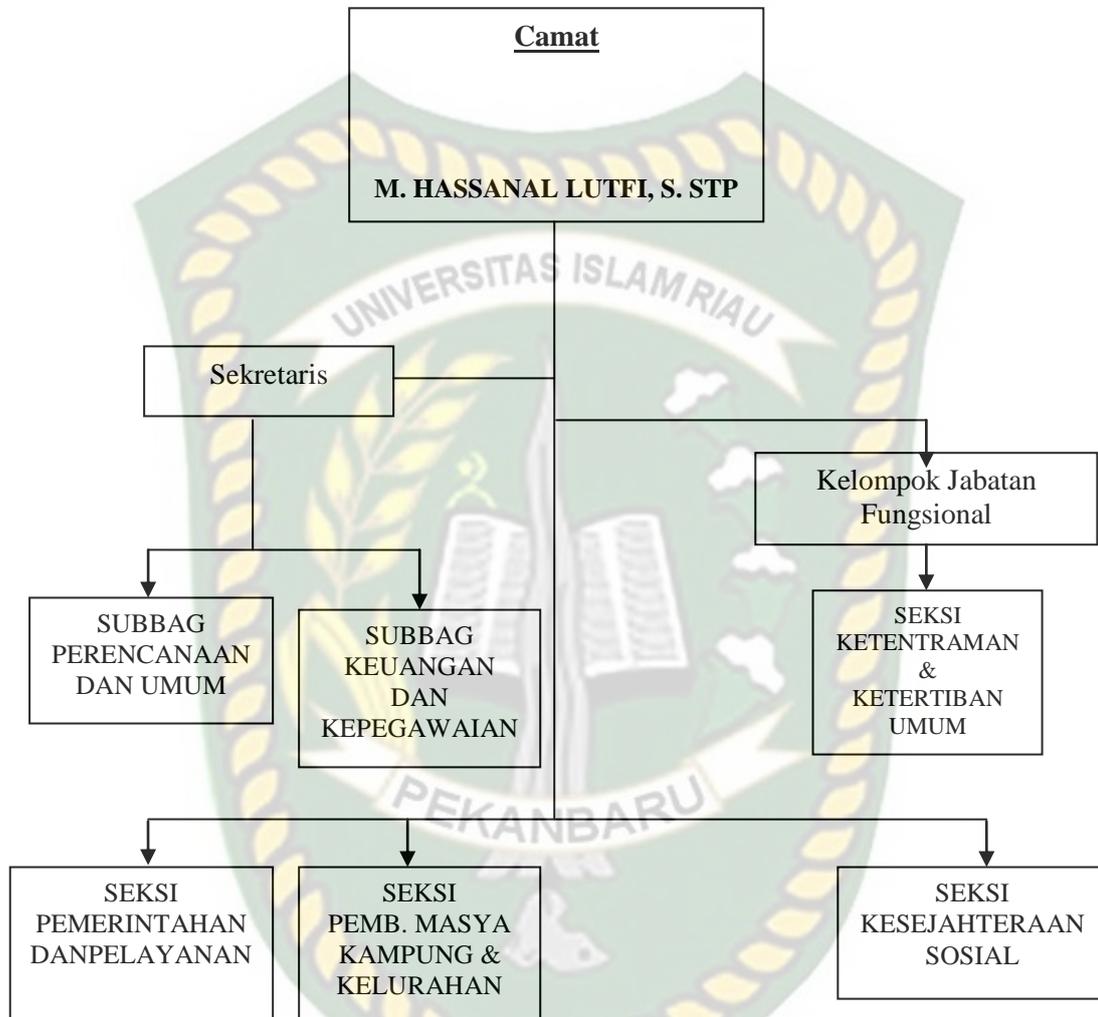
C. Struktur Organisasi Kecamatan Kerinci Kanan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20 September 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kerinci Kanan, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak, ditetapkan bahwa struktur organisasi Kecamatan Kerinci Kanan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Bagian Perencana dan Umum;
 - b. Subbagian Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Kelurahan;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMTAN KERINCI KANAN



Sumber : Kantor Camat Kerinci Kanan

D. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

1. Camat

Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati.

Untuk menjalankan tugas pokoknya, Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa/ kampung dan kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada dikecamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris

- a. Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang sekretariat kecamatan yang selanjutnya

- b. Disebut sekcam yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- c. Sekretariat kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusun
- d. Perencanaan , pengolahan administrasi keuangan dan kepegawaian dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada nomor (2), sekretariat kecamatan mempunyai fungsi :
- 1) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian
 - 2) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 - 3) Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
 - 4) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Sub Bagian Perencanaan Dan Umum

Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan

- a. Sub bagian perencanaan dan umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana strategis pembangunan di wilayah kecamatan

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan pelaporan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja di wilayah kecamatan
- 2) Pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan data potensi kecamatan
- 3) Penyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan
- 4) Penyelenggaraan pembinaan dan koordinasi penyusun rencana dan program pembangunan di wilayah kecamatan
- 5) Pengelolaan data statistik dan informasi di wilayah kecamatan
Pengelolaan system informasi manajemen data di wilayah kecamatan
- 6) Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan
- 7) Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan
- 8) Pengevaluasi dan penyusunan laporan hasil kegiatan kecamatan
Penyusun laporan hasil kegiatan di wilayah kecamatan.

4. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian

- a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan
- b. Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan

c. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja kecamatan
- 2) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan, penyusun rencana kegiatan anggaran (rka) dan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa)
- 3) Pengelolaan pembinaan dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan
- 4) Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan
- 5) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan keuangan belanja rutin dan pembayaran keperluan dinas
- 6) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan daerah
- 7) Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan bukti-bukti kas dan surat-surat berharga lainnya
- 8) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan
- 9) Penyusunan laporan hasil kegiatan di bidang administrasi keuangan

5. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat
- b. Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan
- 2) Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan
- 3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan
- 4) Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan

d. Rincian tugas seksi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana kerja seksi pemerintahan
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan
- 3) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa
- 4) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa /kelurahan di wilayah kejanya
- 5) Memfasilitasi penataan desa /kelurahan
- 6) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa
- 7) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan
- 8) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan
- 9) Melaksakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya
- 10) Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan

pembangunan ,serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- 11) Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan,proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan
- 12) Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara di wilayah kerjanya
- 13) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (pbb)
- 14) Membina dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- 15) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan
- 16) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi
- 17) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban

- 1) Seksi ketentraman dan ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat.

- 2) Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi dan ketertiban
 - c. Penyiapan bahan bimbingan, koordinasi dan fasilitas pelaksana kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- 4) Rincian tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum
 - a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum
 - b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
 - d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam
 - e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal

- g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaraman dan ketertiban masyarakat
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas :

Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan sebagai tugas camat dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya.

Rincian :

- a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman teknis maupun pedoman pelaksanaan lainnya yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan rencana dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat, fasilitas pembangunan desa/kelurahan dan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, lembaga perempuan dan keluarga, karang taruna, rukun warga, rukun tetangga, dan lembaga lainnya (atau nama lain).

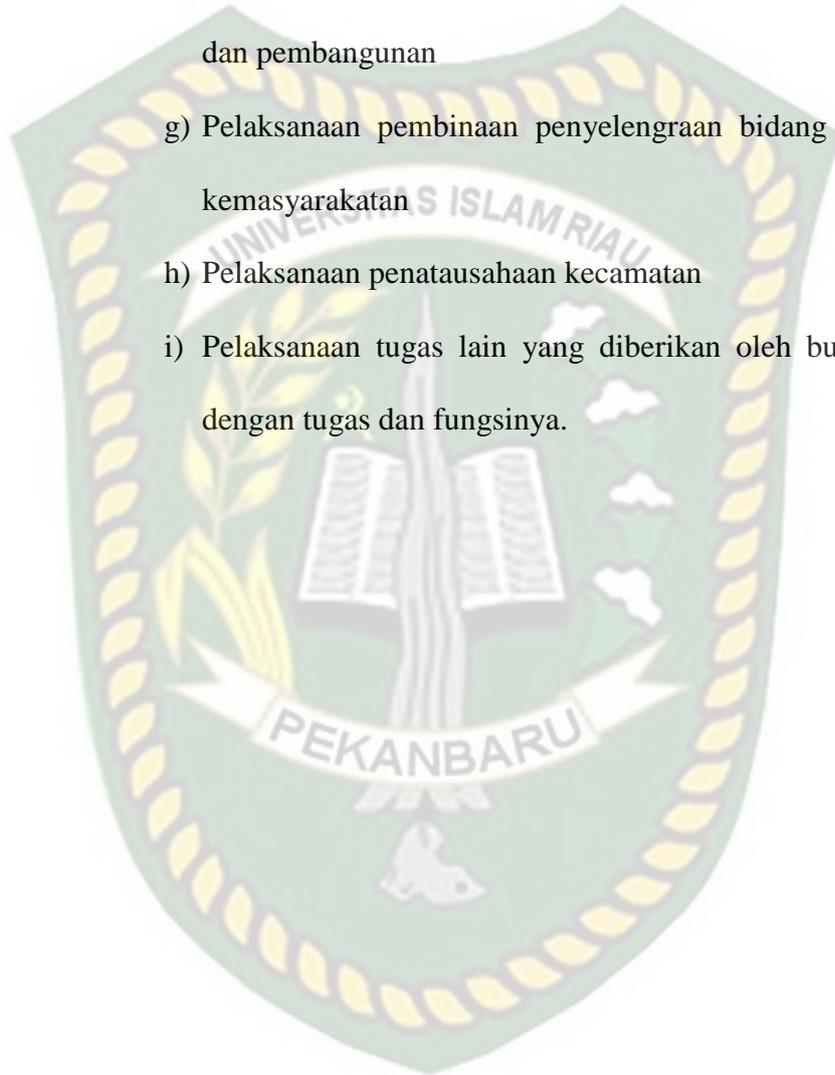
- c. Menyiapkan bahan rencana dan koordinasi dengan skpd, upt, instansi vertikal atau swasta mengenai pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayan umum
- d. Menyiapkan bahan rencana dan menyelenggarakan pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya
- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja yang dilaksanakan oleh skpt, dan/atau upt, instansi vertikal dan swasta
- g. Mengkoordinasikan penyusunan profil desa atau kelurahan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-perundangan
- i. Melakukan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah sesuai dengan bidangnya.
- j. Menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan

umum serta pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam menangani sebagian urusan otonomi sesuai dengan bidangnya

k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

- a. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan hubungan masyarakat
- b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan
- c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- f. Camat dalam melaksanakan tugas mana yang dimaksud pada ayat (4), menyelenggarakan fungsi
 - a) Penyusunan program dan kegiatan kecamatan
 - b) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan
 - c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology negara dan kesatuan bangsa
 - d) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat

- e) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
- f) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan
- g) Pelaksanaan pembinaan penyelengraan bidang sosial dan kemasyarakatan
- h) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Maka berdasarkan uraian berikut :

A. Identitas Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu : Camat Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kiri, Kepala Desa Bukit Agung, Masyarakat dari setiap desa.

Identitas informan diperlukan guna memberi informasi dan gambaran yang akurat dalam hasil penelitian ini. Adapun identitas informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Kerinci Kanantingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan Responden	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
1	Camat Kerinci Kanan					1		1
2	Kepala Desa Kerinci Kanan			1				1
No	Jabatan Responden	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	
3	Kepala Desa Kerinci Kiri			1				1

4	Kepala Desa Bukit Agung			1				1
5	Masyarakat		1	2				3

Sumber : Data Olahan Peneliti Di Lapangan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, informan memiliki pendidikan SMP, SMA, dan S1. Dapat disimpulkan pada keseluruhan tingkat pendidikan informan di atas tergolong memiliki SDM yang cukup baik.

2. Identitas Informan Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui umur informan pada penelitian ini maka dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V.II Jumlah Informan Berdasarkan Umur

No.	Jabatan Responden	Tahun Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40-49	50-59	60	
1	Camat Kerinci Kanan				1		1
2	Kepala Desa Kerinci Kanan			1			1
3	Kepala Desa Kerinci Kiri			1			1
4	Kepala Desa Bukit Agung			1			1
5	Masyarakat		2	1			3

Sumber : Data Olahan Peneliti Dilapangan, 2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan informan yang berusia 30 s.d 39 berjumlah 2 orang sedangkan informan yang berusia 40 s.d 49 berjumlah 4 orang dan informan yang berusia 50-59 berjumlah sebanyak 1 orang.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan judul *Capacity Building Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*. Maka data responden berupa pengumpulan data yaitu wawancara setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan mendapatkan hasil penelitian dengan indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Pada indikator sumber daya manusia ini dapat dijelaskan mengenai tanggapan tentang *Capacity Building Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak*. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Sumber Daya Manusia sebagai Berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yaitu Bapak M. Hassanal Lutfi, S.STP saat di wawancarai di Kantor Camat Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang kegiatan bimbingan apa yang dilakukan untuk kepala desa. Berikut hasil wawancara tersebut :

Untuk kegiatan yang dilakukan kami mengadakan pembinaan kepada kepala desa maupun perangkat desa tentang penyelenggaraan administrasi desa. Pembinaan yang kami laksanakan untuk membantu dan memberikan

pengarahan mengenai administrasi desa dan laporan penanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga desa tidak kesulitan dalam pelengkapan mengenai administrasi desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemerintah Kecamatan telah melakukan kegiatan pembinaan untuk meningkatkan sumber daya manusia perangkat desa yaitu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada aparatur pemerintahan desa.

Berikut lanjutan wawancara bersama Camat Kerinci Kanan tentang pemberian arahan mengenai rincian tugas seperti apakah yang dilakukan oleh camat. Hasil wawancara sebagai berikut :

Selaku pemerintah Kecamatan kami melakukan pembinaan seperti memberitahukan tata cara penyusunan administrasi desa, proses pengelolaan keuangan, petunjuk teknik pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa, dan memfasilitasi penyusunan administrasi desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa secara keseluruhan Camat telah melakukan tugasnya dengan baik.

Hal ini juga di jelaskan oleh camat Kerinci Kanan tentang bila kepala desa maupun perangkat desa mengalami keraguan dalam menjalankan tugas apakah mengadakan diskusi. Berikut hasil wawancara tersebut:

Iya itu pasti, jika kepala desa maupun perangkat desa mengalami kendala serta keraguan dalam menjalankan tugasnya kami akan melakukan diskusi, namun karena minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk perlengkapan data administrasi desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Desa Kerinci Kanan yaitu Bapak Yusrihanis di Kantor Desa Kerinci Kanan beliau mengatakan :

Camat telah melakukan pembinaan di desa melalui kepala seksi pemerintahan kecamatan tentang petunjuk teknis operasional administrasi, serta jika kami mengalami kendala pihak kecamatan akan mengajak kami melakukan diskusi, namun rendahnya sumber daya manusia dan tingkat pengetahuan serta fasilitas yang belum memadai menjadi faktor penghambat bagi kami dalam melakukan tugas. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Rusli Di Kantor Desa Kerinci Kiri, beliau mengatakan :

Sebenarnya camat telah melakukan tugasnya dengan baik, seperti pembinaan yang dilakukan telah dilakukan di desa, namun kami menyadari kurangnya pemahaman atas pekerjaan yang telah diberikan sehingga terjadi keraguan serta kendala dalam melakukan tugas. (Pada tanggal Selasa, 20 Juli 2020)

Dilanjut wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung yaitu Bapak Parlaungan Panjaitan beliau mengatakan :

Sebagai aparat desa kami hanya melakukan tugas yang diberikan, namun dalam melakukan tugas kami sebenarnya masih kekurangan fasilitas sehingga tingkat pengetahuan kami sebatas mengerjakan pekerjaan sesuai fasilitas yang ada. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dengan Camat Kerinci Kanan dan 3 Kepala Desa yaitu Kepala Desa Kerinci Kanan, Kepala Desa Kerinci Kiri dan Kepala Desa Bukit Agung peneliti menganalisis bahwa kendala dari proses pekerjaan kepala desa adalah fasilitas yang kurang memadai sehingga kurangnya pemahaman atas perkembangan ilmu pengetahuan. Seharusnya perlengkapan fasilitas administrasi desa memadai sehingga tidak terjadi keraguan dalam melakukan tugasnya.

Dilanjut wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kerinci Kanan, Bapak Agus selaku warga Desa Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang fasilitas yang ada di Kantor Desa Kerinci Kanan. Berikut hasil wawancara tersebut :

Fasilitas yang ada di Desa Kerinci Kanan memang kurang seperti kursi, saya sebagai warga merasa kurang nyaman kalau mengurus surat yang dibutuhkan dan harus menunggu lama sambil berdiri. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kerinci Kiri, Bapak Sutar selaku warga Desa Kerinci Kiri beliau mengatakan tentang fasilitas yang ada di Kantor Desa Kerinci Kiri. Berikut hasil wawancara tersebut :

Untuk fasilitas alhamdulillah sekarang sudah lumayan, di Desa Kerinci Kiri juga sekarang lagi melakukan pembangunan untuk parkir motor dan kemarin juga saya lihat ada tambahan kursi di Kantor Desa. (Pada tanggal Selasa, Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Bukit Agung, Bapak Rahmad selaku warga Desa Bukit Agung beliau mengatakan fasilitas yang ada di Kantor Desa Bukit Agung. Berikut hasil wawancara tersebut :

Secara keseluruhan untuk fasilitas yang saya lihat ya biasa ada kursi untuk warga yang sedang mengurus kepentingan disana, tapi jika banyak yang mengurus ya harus mengantri dan ada yang tidak kebagian kursi. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dari masing-masing desa yaitu Bapak Agus dari Desa Kerinci Kanan, Bapak Sutar dari Desa Kerinci Kiri dan Bapak Rahmad dari Desa Bukit Agung peneliti menganalisis bahwa Kecamatan harus melakukan survei dan melihat secara keseluruhan tentang fasilitas yang ada di desa sehingga dalam melakukan

pelayanan masyarakat bisa merasa nyaman dan aparat desa juga tidak di desak dengan alasan fasilitas yang kurang memadai.

2. Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk melakukan kerjasama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya.

Pada indikator organisasi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan mengenai *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator organisasi sebagai berikut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yaitu Bapak M. Hassanal Lutfi, S. STP saat di wawancarai di Kantor Camat Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang bagaimana dalam melakukan intruksi lisan, tertulis dan praktik terhadap kepala desa mana yang lebih mudah dipahami. Berikut hasil wawancara tersebut :

Menurut saya sebagai Camat saya terlebih dahulu harus memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang tidak mereka butuhkan, jika dalam penyampaian tugas kepala desa lebih memahami dengan cara praktik langsung saya akan melakukannya dengan cara praktik. Tapi selama ini saya melakukan ketiganya pertama saya memberikan intruksi secara lisan, setelah itu saya memberikan catatan secara tertulis biar semakin mudah dipahami barulah kami melakukan praktik langsung ke lapangan. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan dapat peneliti analisis bahwa untuk memahami sebuah pekerjaan aparat Kecamatan juga

harus menyiapkan tata cara penyusunan dan tahapan dalam melakukan tugas, barulah memberikan intruksi secara lisan maupun tulisan serta praktik langsung agar lebih mudah dipahami.

Dilanjutkan wawancara tentang pemberian perintah terhadap kepala desa apakah perintah tersebut dijalankan sesuai rencana atau tidak. Berikut hasil wawancara tersebut :

Sebelum memberikan perintah terlebih dahulu kami memberikan pelatihan tata cara penyusunan baik administrasi umum, keuangan, kependudukan, pembangunan dan BPD. Pelatihan ini diikuti oleh perangkat desa diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari atasannya. Semua ini kami lakukan untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam melayani masyarakat dan bisa melakukan perintah yang kami berikan secara baik. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat di analisis dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh aparat kecamatan maka perintah yang diberikan oleh atasan dapat dijalankan sesuai yang diinginkan dan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat memberikan peningkatan agar masyarakat yang dilayani merasa puas akan pelayanan yang diberikan aparat desa.

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Kerinci Kanan yaitu Bapak Yusrihanis di Kantor Desa Kerinci Kanan selaku Kepala Desa Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang apakah bimbingan dan pelatihan yang diberikan Camat Kepada Kepala Desa dapat membantu dalam menjalankan tugas. Berikut hasil wawancara tersebut :

Alhamdulillah sangat membantu kami dalam melakukan administrasi desa, selain itu juga meningkatkan kemampuan kami dalam melayani masyarakat, sehingga masyarakat yang kami layani pun puas dengan pelayanan yang kami berikan. (Pada tanggal Senin, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Rusli Di Kantor Desa Kerinci Kiri selaku Kepala Desa Kerinci Kiri beliau mengatakan tentang apakah bimbingan dan pelatihan yang diberikan Camat Kepada Kepala Desa dapat membantu dalam menjalankan tugas. Berikut hasil wawancara tersebut :

Ya pastinya membantu tetapi karena tingkat kemampuan pengetahuan sumber daya manusia kami kurang, semua pelatihan dan bimbingan yang diberikan aparat kecamatan tidak dilakukan secara menyeluruh. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung yaitu Bapak Parlaungan Panjaitan Di Kantor Desa Bukit Agung selaku Kepala Desa Bukit Agung beliau mengatakan tentang apakah bimbingan dan pelatihan yang diberikan Camat Kepada Kepala Desa dapat membantu dalam menjalankan tugas. Berikut hasil wawancara tersebut :

Sangat membantu kami terutama dalam melakukan pelayanan sekarang kami bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, kami sangat berharap bimbingan serta pelatihan ini bisa dilakukan secara rutin agar meningkatkan kemampuan kami. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kerinci Kanan Bapak Yusrihanis, Kepala Desa Kerinci Kiri Bapak Rusli, dan Kepala Desa Bukit Agung Bapak Parlaungan Panjaitan peneliti, dapat di analisis dengan adanya bimbingan serta pelatihan yang dilakukan oleh aparat kecamatan sangat

membantu namun sangat disayangkan jika masih ada salah satu desa yang masih kurang paham dengan pelatihan sehingga membuat sistem pelayanan administrasi desa kurang memuaskan bagi masyarakat.

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Kerinci Kanan yaitu Bapak Agus, beliau selaku warga Kerinci Kanan mengatakan tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat desa dalam melayani masyarakat Desa Kerinci Kanan. Berikut hasil wawancara tersebut :

Pelayanan yang dilakukan oleh perangkat desa lumayan baik, baik dari sisi komunikasi, pemberi arahan kepada masyarakat yang belum paham tentang prosedur, mereka memberikan yang terbaik untuk masyarakat agar masyarakat nyaman dalam proses pelayanan yang diberikan aparat desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Sutar, beliau selaku warga Kerinci Kiri mengatakan tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat desa dalam melayani masyarakat Desa Kerinci Kiri. Berikut hasil wawancara tersebut :

Kalau masalah pelayanan saya sebagai warga merasa kurang puas dengan pelayanan aparat desa kerinci kiri, karena mereka kurang menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan surat. Misalnya ada warga yang ingin mengurus surat akte kelahiran anak, disini mereka hanya sebatas memberikan kertas yang berisi persyaratan tanpa menjelaskan. Dan waktu dalam melayani selalu tidak tepat waktu. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu Desa Bukit Agung yaitu Bapak Rahmad, beliau selaku warga Desa Bukit Agung mengatakan tentang bagaimana pelayanan yang dilakukan aparat desa dalam melayani masyarakat Desa Bukit Agung. Berikut hasil wawancara tersebut :

Saya pribadi pelayanan yang diberikan oleh aparat desa sangat membantu, karena di Kantor Desa Bukit Agung pegawai yang di pekerjaan paham dengan prosedur pelayanan sehingga mereka paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, jika kami mengalami kendala mereka akan memberikan arahan dengan cara yang baik serta sopan. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dari masing-masing desa yaitu Bapak Agus dari Desa Kerinci Kanan, Bapak Sutar dari Desa Kerinci Kiri dan Bapak Rahmad dari Desa Bukit Agung peneliti dapat di analisis langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak baik yang memberikan pelayanan (aparatur desa) ataupun yang menerima pelayanan (masyarakat) hendaknya saling bekerjasama dengan baik, yakni bagi aparatur desa dengan meningkatkan kualitas layanan baik dari aspek prosedur yang perlu disederhanakan, kejelasan unit kerja dan transparansi biaya pelayanan, kemudian bekeanan dengan waktu layanan dengan cara menyelesaikan layanan tepat waktu.

3. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan pada intinya menunjukkan pada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggara progrm kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai. Reformasi kelembagaan menunjukkan dua aspek penting yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menompang program pengembangan kapasitas karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identifikasi kapasitas yang dimiliki maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini penting kerena

kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas.

Pada indikator Reformasi Kelembagaan ini dapat dijelaskan mengenai tanggapan tentang *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Reformasi Kelembagaan sebagai Berikut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yaitu Bapak M. Hassanal Lutfi, S.STP saat di wawancarai di Kantor Camat Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang kegiatan yang dilakukan untuk berinteraksi dengan kepala desa serta masyarakat. Berikut hasil wawancara tersebut :

Selain melakukan bimbingan saya sebagai Camat juga harus melakukan kegiatan turun kelapangan yang di sebut dengan pengawasan. Pengawasan yang saya lakukan untuk memantau pekerjaan Kepala Desa serta aparat desa di setiap desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah pekerjaan saya. Hal ini saya lakukan agar mengetahui hasil kerja yang dijalankan oleh pemerintahan desa, atas kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan atau masih ada kekurangan dalam menjalankan kegiatan administrasinya. Sejalan dengan melakukan pengawasan disini saya juga sambil berinteraksi dengan Kepala Desa serta masyarakat setempat. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan dapat peneliti analisis agar interaksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka harus rutin melakukan pengawasan agar pekerjaan pemerintahan desa bisa dilihat secara langsung dan jika ada kendala bisa langsung berinteraksi dan segera diatasi.

Dilanjutkan wawancara tentang bagaimana kerjasama antara aparat kecamatan dengan unit-unit perangkat desa bisa terjalin dengan baik. Berikut hasil wawancara tersebut :

Karna dalam organisasi kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama maka hal ini saya sebagai camat juga saling berinteraksi dengan unit-unit perangkat desa, bertanya apa ada kendala dalam melakukan tugas, jika ada saya akan membantu karena hubungan kerjasama ini untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam suatu pekerjaan. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Camat Kerinci Kanan peneliti dapat di analisis dengan adanya kerjasama ini tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, karena pada dasarnya organisasi pemerintahan kecamatan merupakan satu sistem dimana antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan.

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Kerinci Kanan yaitu Bapak Yusrihanis di Kantor Desa Kerinci Kanan selaku Kepala Desa Kerinci Kanan beliau mengatakan tentang kemampuan Camat dalam melakukan interaksi dan kerjasama di Desa Kerinci Kanan. Berikut hasil wawancara tersebut :

Dalam setiap interaksi yang dilakukan oleh pak camat selalu membagi tugas setiap kepala-kepala desa terutama dalam pembangunan fisik yang sedang berjalan di setiap desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Rusli di Kantor Desa Kerinci Kiri selaku Kepala Desa Kerinci Kiri beliau mengatakan tentang kemampuan Camat dalam melakukan interaksi dan kerjasama di Desa Kerinci Kiri. Berikut hasil wawancara tersebut :

Kemampuan pak camat dalam melakukan interaksi dalam pekerjaan cukup baik, dia memberikan arahan kepada kami dengan cara yang sangat mudah di pahami karena beliau tau kemampuan sumber daya manusia aparatur desa kami masih tergolong rendah. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara dengan Kepala Desa Bukit Agung yaitu Bapak Parlaungan Panjaitan di Kantor Desa Bukit Agung selaku Kepala Desa Kerinci Kiri beliau mengatakan tentang kemampuan Camat dalam melakukan interaksi dan kerjasama di Desa Bukit Agung. Berikut hasil wawancara tersebut :

Saya sebagai Kepala Desa merasakan hubungan kerjasama yang terjalin dengan saling berinteraksi langsung membuat kami semakin dekat serta semakin paham akan pekerjaan, jika Pak Camat sering turun kelapangan kami pun sebagai aparat desa sangat senang karna dari situ bisa kita melihat atasan peduli dengan bawahan. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kerinci Kanan Bapak Yusrihanis, Kepala Desa Kerinci Kiri Bapak Rusli, dan Kepala Desa Bukit Agung Bapak Parlaungan Panjaitan, peneliti, dapat di analisis bahwa interaksi yang dilakukan dan bisa langsung turun di lapangan sangat membantu kinerja para pegawai, tidak hanya itu Pak Camat juga bisa langsung mengetahui tingkat kemampuan sumber daya manusia di setiap desa.

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Kerinci Kanan yaitu Bapak Agus, beliau selaku warga Desa Kerinci Kanan mengatakan tentang Apakah Bapak sebagai masyarakat pernah melihat langsung Pak Camat turun di lapangan berinteraksi kepada kepala desa maupun Perangkat Desa atau pernah langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus. Berikut hasil wawancara tersebut :

Saya kurang mengetahui hal itu, namun ada beberapa kali Pak Camat datang ke Kantor Desa ketika saya hendak mengurus surat, Pak Camat begitu ramah. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Kerinci Kiri yaitu Bapak Sutar, beliau selaku warga Desa Kerinci Kiri mengatakan tentang Apakah Bapak sebagai masyarakat pernah melihat langsung Pak Camat turun di lapangan berinteraksi kepada kepala desa maupun Perangkat Desa atau pernah langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus. Berikut hasil wawancara tersebut :

Iya saya pernah melihat Pak Camat juga langsung turun kelapangan mungkin karena ada urusan di lapangan yang mendesak sehingga Pak Camat beserta aparat desa juga ikut. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Dilanjutkan wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat Desa Bukit Agung yaitu Bapak Rahmad, beliau selaku warga Desa Bukit Agung mengatakan tentang Apakah Bapak sebagai masyarakat pernah melihat langsung Pak Camat turun di lapangan berinteraksi kepada kepala desa maupun Perangkat Desa atau pernah langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus. Berikut hasil wawancara tersebut :

Sepertinya sering, mungkin karena jarak antara Kantor Kecamatan dengan Kantor Desa tidak begitu jauh jadi Pak Camat sering mendatangi dan sering melakukan adaptasi baik dengan aparat desa maupun masyarakat seperti kami. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu masyarakat dari masing-masing desa yaitu Bapak Agus dari Desa Kerinci Kanan, Bapak Sutar dari Desa Kerinci Kiri dan Bapak Rahmad dari Desa Bukit Agung peneliti dapat di analisis bahwa dalam kenyataannya mereka semua butuh bimbingan dan kepedulian dari seorang atasan. Dengan adanya interaksi secara langsung mereka lebih mudah menilai kemampuan seorang atasan dalam memimpin bawahannya, jika aparat kecamatan bisa sering melakukan interaksi dengan aparat desa maupun masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah bahkan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan indikator sumber daya, organisasi dan reformasi kelembagaan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya untuk pembinaan yang dilakukan oleh camat terhadap kepala desa yang ada di kecamatan kerinci kanan kabupaten siak sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dengan adanya pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada setiap aparatur yang ada didalam pemerintah desa. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan yang diberikan maka pelayanan administrasi yang ada disetiap desa diharapkan mampu berjalan dengan maksimal sesuai dengan tuntutan masyarakat agar mendapatkan pelayanan yang baik dan memuaskan. Namun disisi lain masih juga adanya kendala yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan kepala desa baik dari sumber daya teknisnya maupun dari sumber daya manusianya, diantaranya yaitu fasilitas yang kurang memadai sehingga kurangnya pemahaman atas perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini seharusnya fasilitas desa yang tersedia untuk memberikan pelayann

administrasi terhadap masyarakat perlu dicukupkan sehingga tidak terjadi keraguan dalam melakukan tugasnya dan berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat peneliti menganalisis bahwa Kecamatan harus melakukan survei dan melihat secara keseluruhan tentang fasilitas yang ada di desa sehingga dalam melakukan pelayanan masyarakat bisa merasa nyaman dan aparat desa juga tidak di desak dengan alasan fasilitas yang kurang memadai. Selain itu peneliti melihat dengan adanya pelatihan yang dilakukan oleh aparat kecamatan maka perintah yang diberikan oleh atasan dapat terkoordinasi dengan baik atau dapat berjalan sesuai dengan yang ditetapkan. Peneliti juga melihat masih adanya salah satu desa yang belum sepenuhnya paham dengan adanya pelatihan yang diberikan sehingga berdampak pada sistem pelayanan administrasi desa kurang memuaskan bagi masyarakat. Untuk langkah yang perlu dilakukan oleh semua pihak baik yang memberikan pelayanan (aparatur desa) ataupun yang menerima pelayanan (masyarakat) hendaknya saling bekerjasama dengan baik, yakni bagi aparatur desa dengan meningkatkan kualitas layanan baik dari aspek prosedur yang perlu disederhanakan, kejelasan unit kerja dan transparansi biaya pelayanan, kemudian bekenaan dengan waktu layanan dengan cara menyelesaikan layanan tepat waktu. Agar interaksi berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka harus rutin melakukan pengawasan agar pekerjaan pemerintahan desa bisa dilihat secara langsung dan jika ada kendala bisa langsung berinteraksi dan segera diatasi dan dengan adanya kerjasama ini tujuan yang hendak dicapai organisasi yang sudah digariskan dalam bentuk keputusan bersama akan terwujud, karena pada dasarnya organisasi pemerintahan kecamatan merupakan satu sistem dimana antara bagian

yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu keutuhan yang tidak terpisahkan serta dengan adanya interaksi secara langsung mereka lebih mudah menilai kemampuan seorang atasan dalam memimpin bawahannya, jika aparat kecamatan bisa sering melakukan interaksi dengan aparat desa maupun masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah bahkan desa.

C. Faktor Penghambat *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang penulis lakukan, yang menjadi faktor penghambat *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama bapak M.

Hassanal Lutfi selaku camat kerinci kanan yang menyatakan sebagai berikut:

Iya itu pasti, jika kepala desa maupun perangkat desa mengalami kendala serta keraguan dalam menjalankan tugasnya kami akan melakukan diskusi, namun karena minimnya sumber daya manusia, perkembangan ilmu administrasi aparat desa serta dukungan peralatan yang belum memadai sehingga sedikit menghambat untuk perlengkapan data administrasi desa. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara dengan camat kerinci kanan, beliau menegaskan bahwa pembinaan yang diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa sudah dilakukan untuk membantu dan memberikan pengarahan kepada perangkat mauapun kepala desa dalam menjalankan administrasi desa dan laporan

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, namun kendala yang dihadapi dalam hal ini adalah tidak mencukupinya fasilitas yang tersedia yang dapat menunjang jalannya administrasi desa dan juga minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia sehingga jalannya proses administrasi yang ada di desa mengalami hambatan. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak Rusli selaku kepala desa Kerinci Kiri, yang mengatakan:

Ya pastinya membantu tetapi karena tingkat kemampuan pengetahuan sumber daya manusia kami kurang, semua pelatihan dan bimbingan yang diberikan aparat kecamatan tidak dilakukan secara menyeluruh. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan ungkapan di atas masalah lain yang menjadi kendala adalah tingkat kemampuan atau kompetensi yang dimiliki desa masih terbatas sehingga membuat pelayanan administrasi desa menjadi terhambat dan masyarakat kurang puas dengan pelayanan yang diterima dari pemerintah desa. Pembinaan yang dilakukan juga dianggap telah membantu perangkat desa dalam melakukan pelayanan administrasi hanya saja terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa dari segi pengetahuan dan kompetensinya sehingga pelayanan dan pembinaan yang dilakukan kurang optimal, sehingga Camat Kerinci Kanan sering turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh bapak M. Hassanal Lutfi, S.STP selaku Camat Kerinci Kanan, yaitu sebagai berikut:

Karna dalam organisasi kerjasama itu penting dalam rangka untuk mencapai tujuan bersama maka hal ini saya sebagai camat juga saling berinteraksi dengan unit-unit perangkat desa, bertanya apa ada kendala dalam melakukan tugas, jika ada saya akan membantu karena hubungan kerjasama ini untuk menyelesaikan tugas dan

tanggungjawab dalam suatu pekerjaan. (Pada tanggal Selasa, 21 Juli 2020)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa Camat sudah melakukan koordinasi dengan perangkat-perangkat Desa untuk membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab baik dari tugas dan tanggung jawab Camat itu sendiri maupun dari tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Desa. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan langsung masalah ataupun kendala yang ada dengan melakukan pengawasan. Karena pengawasan yang dilakukan untuk memantau pekerjaan Kepala Desa serta aparat Desa di setiap Desa dan memeriksa kelengkapan administrasi desa yang sudah menjadi bagian dari wilayah pekerjaan seorang Camat.

Dari hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat pembinaan yang diberikan oleh Camat kepada Desa sudah cukup optimal hanya saja kurangnya perlengkapan yang menunjang jalannya pelayanan administrasi yang ada di Desa, seperti peneliti melihat masih kurangnya kursi yang ada di loket pelayanan sehingga masyarakat banyak yang mengantri dengan berdiri karena tidak mencukupinya fasilitas kursi yang disediakan yang membuat masyarakat yang kurang nyaman apabila mengurus surat yang dibutuhkan dan harus menunggu lama. Selain itu kendala yang lain yaitu masih adanya perangkat desa atau sumber daya manusianya yang belum sepenuhnya mengetahui dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sedangkan Camat sendiri telah melakukan pembinaan dan pelatihan kepada perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu Camat kerinci kanan sendiri juga telah melakukan kerjasama atau koordinasi dengan baik terhadap pemerintah desa maupun

perangkat Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang baik. Dengan adanya interaksi secara langsung mereka lebih mudah menilai kemampuan seorang atasan dalam memimpin bawahannya, jika aparat kecamatan bisa sering melakukan interaksi dengan aparat Desa maupun masyarakat akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di setiap daerah bahkan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan melalui observasi dan wawancara, maka dapat disimpulkan faktor yang menjadi penghambat terhadap *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak dapat dilihat sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) perangkat desa yang menjadi penghambat dalam peningkatan *capacity building* camat di kerinci kanan. Hal ini disebabkan masih banyak yang kurang paham dalam mengoperasikan fasilitas yang ada di kantor. Keterbatasan sarana prasarana yang ada di desa mengakibatkan pelayanan administrasi dalam melayani masyarakat mengalami kendala dan membutuhkan waktu lama dalam proses pelayanan.
2. Penyelenggaraan peraturan yang tidak kondusif yang menghambat pengembangan *capacity building*, kebijakan pemimpin/camat dalam menyediakan fasilitas, ruang dan waktu ini sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kemampuan personal maupun organisasi.
3. Kurangnya sarana prasarana yang sangat menghambat sistem kerja dari pembinaan yang dilakukan oleh camat sehingga *capacity building* seorang

camat belum optimal. Disini butuh partisipasi dari aparaturnya kecamatan dan aparaturnya desa serta masyarakat untuk saling melengkapi kekurangan yang ada.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan bahwa *Capacity Building* Camat Dalam Melakukan Pembinaan Kepala Desa Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak. Camat telah melakukan pembinaan dengan kemampuan yang dimiliki, dan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Camat telah melakukan pembinaan yang berupa pemberian bimbingan kepada aparatur desa. Dalam pemberian bimbingannya menunjukkan bahwa Camat sebagai aparatur pemerintah Kecamatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, akan tetapi yang menjadi faktor penghambatnya adalah rendahnya sumber daya dari aparatur desa sehingga menjadi kendala dalam proses peningkatan *capacity building* seorang camat.
2. Camat telah memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah desa. Dalam pemberian pelatihannya bahwa pemerintah Kecamatan sudah baik dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi sarana dan prasarana dalam proses pelatihan masih kurang memadai sehingga dalam proses pelatihan yang dilakukan oleh camat tidak maksimal.
3. Sebagai Aparatur Pemerintah Kecamatan, Camat juga telah melakukan pengawasan kepada aparatur desa. Pengawasan yang dilakukan oleh camat dengan cara turun ke lapangan, berinteraksi

secara langsung kepada aparaturnya desa serta masyarakat, hal ini membuktikan bahwa Camat telah melakukan tugasnya.

Dengan demikian bahwa *capacity building* bukan proses yang berangkat dari nol melainkan berawal dari membangun potensi yang sudah ada kemudian diproses agar lebih meningkatkan kualitas diri, kelompok, organisasi, serta sistem agar tetap bertahan ditengah lingkungan yang mengalami perubahan terus menerus dengan memanfaatkan kerjasama antara aparaturnya kecamatan dengan aparaturnya desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kecamatan Kerinci Kanan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di aparaturnya desa dengan memadai fasilitas yang kurang di setiap desa
2. Meningkatkan kemampuan yang belum sesuai dengan keahlian pada bidang pekerjaannya dan harus lebih teliti dalam bekerja, menguasai dan memahami tugas sudah menjadi tugas para pegawai agar tidak terjadi kekeliruan pada hasil pekerjaannya.
3. Menciptakan sistem administrasi desa yang baik dengan menempatkan perangkat desa sesuai dengan keahlian dan bidangnya agar dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melayani masyarakat dapat dilakukan sebaik mungkin serta dengan waktu yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anni Milen, 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Yogyakarta: Diterjemahkan Secara Bebas Pondok Pustaka Yogya.
- Bungin, Burhan. 2001. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Haryanto. 2014. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan*. AP2I Nasional.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talizuduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Rasyid, Ryaas, 2002. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Riyadi Soeprapto, MS. 2010. *The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance, Word bank*.
- Santoso, Pandji. 2005. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Revika Aditama.
- Santoso, 2005. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia.
- Sugiyono. 2015. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, Inu Kencana. 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Rineka Aditama.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2008. *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup.
- Thoha, Miftah. 2010. *Pembinaan organisasi, Proses dianosa dan Intervensi, Manajemen kepemimpinan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Usman, Husaini. 2009/ *Metododlogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media.

Wijaksono, Kristian Widya. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Winkel, 2002. *Dampak Pembangunan dan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah*, Yogyakarta: Depdikbud.

Zulkifli, ddk.2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Skripsi dan Kertas Kerja*. Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Jurnal

Arif Setiadi *Capacity Building* Pengurus Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Dalam Pelayanan Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kelurahan Babakan Ciparay Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, Vol. 18 No. 1, Juni 2019

Delpi Susanti, Yendri Nazir. 2016 Peranan Camat Dalam Membina Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Universitas Islam Riau. *Jurnal Kajian Pemerintahan Politik dan Birokrasi*, Vol.2, No.2 (2016)

Devit Kurniawan, Jusdin Puluhulawa, Sastro M. Wantu. *Capacity Building* Dinas Pendidikan Dalam Peningkatan Kinerja Guru (Studi Kasus Guru PPKn SMP Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo). *Jurnal Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, Vol.2, No.2, Mei 2017

Gayu Naue, Sarah Sambiran, Frans Singkoh Peran Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Kelurahan Tengkulu Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1,No.1 Tahun 2018

H. Irwandi, Ratnadewi Kebijakan Pemerintah Kecamatan Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol.2, No.2 Desember 2018

Jeniva Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, Heru Ribawanto. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol.1, No.3, h. 103-110

Mirawati, *Capacity Building* Organisasi (Studi Pada Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro). *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 15 (3) (2019) 51-67

Ridha Rahim Allibani, Pembinaan Pegawai Oleh Camat Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Mencapai Efektivitas Kerja Pegawai Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)* No.2 Tahun XI Juni 2017

Refida Ayu Meidini, *Capacity Building* Organisasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* 2014

Syafhendry, Delpi Susanti. 2018. Evaluasi Tugas Camat Dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Rokan Hulu IV Koto Kampar. Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1 (2018)

C. Peraturan Perundang- Undangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.